

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30	31								
HALAMAN : 19											TAHUN 200

PLN dan Telkom Dapat Dana Bank Lokal

JAKARTA (MI): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dapat kucuran dana dari sindikasi bank lokal.

Bila Telkom dapat dana Rp2,4 triliun untuk modal usaha, PLN mendapat kredit jangka panjang Rp10 triliun (ekuivalen US\$1,1 miliar) untuk pendanaan program pembangkit 10 ribu Mw.

Kesepakatan pinjaman itu dilakukan secara bilateral dengan sindikasi bank-bank lokal untuk mendukung pendanaan porsi rupiah bagi pembangunan 13 PLTU dalam program tersebut.

Ketiga belas PLTU tersebut berlokasi di Pacitan, Teluk Naga, Pelabuhan Ratu, Lampung, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Meski begitu, hingga saat ini pendanaan dalam dolar AS untuk PLTU baru di Labuan.

"Penandatanganan pinjaman kredit ini kelanjutan dari dua fasilitas kredit dalam dolar AS dari China Exim Bank yang telah diselesaikan Januari 2008," ujar Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara di Jakarta, Selasa (29/7).

Selain itu, ada lima fasilitas kredit dalam rupiah dari perbankan domestik pada April 2008 dan satu fasilitas kredit dalam dolar AS dari Konsorsium Bank of China pada Mei 2008.

"Ini juga menunjukkan kemajuan lebih jauh dan berkelanjutan dalam pendanaan untuk mendukung program 10 ribu Mw."

Pinjaman-pinjaman tersebut didukung jaminan pemerintah yang diterbitkan Menteri Keuangan. Pinjaman untuk PLTU Labuan merupakan kredit investasi rupiah jangka panjang pertama dengan bank lokal yang dilakukan PLN. Juga, menjadi bagian dari upaya PLN mengelola risiko nilai tukar mata uang.

Konsorsium bank lokal itu dipimpin BNI sebagai *coordinating*

arranger dan BRI sebagai *lender* sindikasi.

Pinjaman Telkom

Pada kesempatan terpisah, BNI juga memimpin sindikasi bank untuk membiayai Telkom. Pada hari yang sama, Telkom menandatangani kesepakatan pinjaman senilai Rp2,4 triliun dari sindikasi perbankan nasional.

"Kebutuhan *capex* kami sebesar US\$2,5 miliar. Kebutuhan itu untuk perluasan usaha seperti pembangunan BTS (*based transceiver station*) dan memperkuat modal. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% berasal dari dana internal dan 35% dari dana eksternal yakni melalui pinjaman bank," ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah sehubungan dengan penandatanganan kesepakatan dengan konsorsium bank di Jakarta, Selasa (29/7).

Lebih jauh, Rinaldi menyatakan perusahaannya tidak berniat menerbitkan obligasi. Sementara itu, untuk menutupi kelebihan kebutuhan *capex*, Telkom akan mencari pinjaman dari bank lain. Pinjaman eksternal yang masih dibutuhkan sekitar US\$1 miliar. Kebutuhan itu terdiri atas US\$400 juta dalam bentuk valuta asing (valas) dan sisanya US\$600 juta dalam nominasi rupiah.

Kendati begitu, Rinaldi menambahkan, Telkom akan mengurangi jumlah pinjaman dalam bentuk valas. Pasalnya, pinjaman valas telah mencapai 40%. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi beban biaya bunga. Sehingga, sebagian besar pendapatan perseroan justru dalam bentuk rupiah. Karena itu, laba kotor (EBITDA) perseroan yang mencapai Rp30 triliun akan digunakan untuk melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo (Pia/Ray/Toh/E-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008



■ ANTARA/DWI PRASETYA

MOU KELISTRIKAN: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kanan) berjabat tangan dengan Dirut Bank Rakyat Indonesia Sofyan Baasyir disaksikan Dirut Bank Negara Indonesia Gatot Murdiantoro Suwondo (kedua dari kiri) dan Wadirut PLN Rudiantara (kanan) se usai penandatanganan perjanjian kredit dalam rangka program percepatan pembangkit 10.000 Mw di Jakarta, Selasa (29/7).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 26

TAHUN 2008

KELISTRIKAN

Kalbar Beli Listrik ke Malaysia

PONTIANAK (MI): Pemerintah pusat menyetujui rencana PLN Wilayah Kalimantan Barat untuk membeli listrik dari Serawak, Malaysia.

Persetujuan itu tertuang dalam surat dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi No 1979/29/600.3/2008 tertanggal 10 Juli 2008.

Kebutuhan listrik tersebut diperuntukkan Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas dan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan kapasitas masing-masing 200 kilovoltampere (kva) dan 400 kva.

Sajingan dan Badau merupakan dua dari 17 kecamatan di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia.

Selama ini pasokan listrik PLN di kedua kawasan tersebut hanya beroperasi selama 12 jam sehari dan masih terdapat sekitar 400 calon pelanggan yang belum terlayani. Diharapkan, pengadaan listrik dari Serawak tersebut

dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga selama 24 jam sehari.

General Manager PLN Wilayah Kalbar Haryanto WS, kemarin, mengatakan rencana pembelian listrik itu telah digagas sejak 1990-an dan terus dimatangkan melalui serangkaian pertemuan bisnis dengan Sarawak Energy Berhard, sebagai perusahaan pemasok.

Sementara itu, penerapan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri mengenai pergeseran jam kerja menemui kendala di lapangan. Jadwal pelaksanaannya diundur dari 31 Juli 2008 menjadi pekan kedua Agustus 2008, ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Djoko Wahjudi.

Akan tetapi, PT PLN APJ (Area Pelayanan Jaringan) Cirebon, Jawa Barat mulai menerapkan aturan SKB lima menteri itu awal Agustus. Tujuh perusahaan bersedia menerapkan aturan baru tersebut. (AR/AO/UL/N-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 200

Separuh Industri Mulai Geser Hari Kerja

Industri menolak rencana kenaikan tarif listrik.

JAKARTA — PT PLN (Persero) mulai hari ini menggeser hari kerja industri maksimal dua hari kerja per bulan ke Sabtu dan Minggu. Namun, dalam tahap awal, pergeseran itu hanya diterapkan untuk 1.150 industri atau 50 persen dari 2.300 industri yang wajib melakukan pergeseran.

Direktur PLN Jawa-Bali Murtaqi mengatakan pergeseran itu terpaksa diterapkan 50 persen karena sebagian industri belum siap. Di sisi lain, PLN merasa belum optimal mensosialisasi pergeseran hari kerja itu ke industri dan pemerintah daerah.

Industri yang belum siap itu baru akan mengikuti pergeseran hari kerja pada minggu kedua Agustus 2008. "Pergeseran itu tidak molor, tapi diterapkan dulu bagi industri yang siap," ujar Murtaqi di Jakarta kemarin. Seperti di Banten, ada 80 dari 110 industri yang sudah siap melakukan pergeseran.

Untuk tahap awal ini, PLN hanya bisa menutup defisit listrik sebesar 90 megawatt dari defisit awal 600 megawatt. Sehingga pada awal Agustus hingga minggu kedua Agustus PLN akan mengalami defisit listrik 510 megawatt per hari kerja pada waktu teangan puncak.

Sedangkan mulai pertengahan

Agustus, setelah seluruh industri melakukan pergeseran hari kerja, PLN dapat menutup defisit listrik 180 megawatt. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan PLN karena masih akan ada defisit listrik 420 megawatt per hari kerja.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, kendala utama tidak optimalnya pelaksanaan pergeseran hari kerja itu adalah sosialisasi dan jadwal pergeseran yang masih belum jelas. "Kami siap saja kalau semuanya jelas," ujarnya.

Di tempat terpisah, belasan pelaku industri menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik industri karena sangat memberatkan industri. Sedangkan industri belum tentu mendapat jaminan pasokan listrik. Rencana itu kini di-

bahas oleh PLN dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Sekretaris Jenderal Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman Franky Sibarani mengaku pihaknya mendapat informasi bahwa PLN, yang mengalami defisit listrik, juga mengalami kesulitan arus kas. "Kami keberatan harus menanggung persoalan arus kas PLN," kata dia. Namun, kalangan industri dapat menerima penyelesaian melalui pergeseran hari kerja. "Kami siap mengimplementasikannya," kata dia. Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G. Ismy. "PLN sebaiknya berfokus pada pergeseran hari kerja," ujarnya.

● AGUNG SEDAYU | YULIARWATI

DAFTAR INDUSTRI YANG MENOLAK KENAIKAN TARIF LISTRIK

- Asosiasi Pertekstilan Indonesia
- Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia
- Forum Komunikasi Pangan Indonesia
- Asosiasi Sari Buah Indonesia
- Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beriodium
- Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia
- Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
- Asosiasi Industri Kakao Indonesia
- Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia
- Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia
- Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia
- Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Retail Modern Indonesia
- Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Coklat Indonesia
- Asosiasi Industri Minuman Ringan
- Asosiasi Teh dalam Kemasan Indonesia

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1-15

TAHUN 200

PLN Dapatkan Utang Rp 10 Triliun

JAKARTA — PT PLN menerima pinjaman dari perbankan nasional sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai program listrik 10 ribu megawatt. Bank yang memberi pinjaman ke PLN di antaranya PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mega, dan PT Bank Bukopin.

Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengatakan, dengan ditandatanganinya kredit tersebut, dana dalam bentuk valuta asing untuk pembangunan proyek sudah terkumpul US\$ 1,45 miliar dari total kebutuhan US\$ 4,4 miliar.

"Sedangkan untuk mata uang rupiah sudah mencapai Rp 13 triliun dari total kebutuhan Rp 17,5 triliun," kata Rudiantara di gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa lalu. Konsorsium BNI dan BRI menyalurkan US\$ 144,28 juta untuk PLTU Labuhan. Kredit itu berjangka waktu 10 tahun. Adapun Bank Mega menyalurkan Rp 4,61 triliun untuk tiga paket. ● EKO NOPHANSYAH

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 32

TAHUN 200

API Minta Harga Jual Listrik Panas Bumi Direvisi

Oleh Happy Amanda Amalia

► JAKARTA- Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) meminta pemerintah segera merevisi aturan mengenai patokan harga jual listrik panas bumi. Regulasi yang direvisi tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik 2008 yang Disediakan PT PLN tertanggal 9 Juni 2008.

Ketua Umum API Surya Darma mengatakan, permen (peraturan menteri) tersebut tidak mencerminkan harga keekonomian pengembangan panas bumi. API memberi tenggat dua pekan ke depan kepada pemerintah agar permen tersebut direvisi.

"Kalau menggunakan angka berdasarkan permen itu, panas bumi tidak akan berkembang," katanya usai seminar *Indonesia Commitment to Develop Geothermal* di Jakarta, Selasa (29/7).

Sesuai permen itu, BPP yang menjadi patokan menghitung formula harga jual listrik panas bumi kepada PT PLN ditetapkan per subsistem ketenagalistrikan. Padahal, saat negosiasi, menurut Surya, kesepakatan pengembang

panas bumi dan PLN adalah BPP dihitung per sistem misalnya Jawa-Bali dan Sumatera.

Dengan berdasarkan sul sistem, harga jual listrik panas bumi ke PLN di Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) akan menjadi tidak ekonomis karena hanya Rp 480 per kilowatt-hour (kWh). "Padahal, jika dijadikan satu sistem Sumatera, harga jual listrik bisa mencapai ke ekonomianya yakni sekitar Rp 850 per kWh," katanya.

Direktur Utama PT Supra Energy Supramu Santosa menambahkan, pengembang panas bumi membutuhkan kepatuhan harga, mengingat tingginya investasi. Ia menjelaskan biaya konstruksi pembangun

panas bumi mencapai US\$ 1,8 juta per megawatt (MW) dan biaya pengeboran mencapai US\$ 8 juta per sumur. "Untuk membangun PLTP (pembangkit listrik panas bumi) berkapasitas 110 MW diperlukan US\$ 275-300 juta," katanya.

Menguntungkan

Tarif listrik PLTP saat ini berkisar US\$ 6 sampai 8 sen per kWh. PT PLN berani membayar investasi pembangunan PLTP tersebut sekitar US\$ 7 sampai US\$ 8 sen per kWh. "Karena itu, tidak ada alasan lagi investasi PLTP tersebut kurang menarik," ujar Dirjen Pemanfaatan Listrik dan Energi PLN J Purwono.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai, persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banko Tengah di Muara Enim dengan kapasitas 4x600 MW berlarut-larut. Karena itu, Wapres meminta PT Perusahaan Tambang Batu bara Bukit Asam (BA) untuk melaporkan persiapan tersebut dalam satu bulan ke depan.

"Persiapan *engineering, procurement and construction (EPC)* semuanya harus rampung dalam sebulan," tegas Wapres ketika berkunjung ke PT BA Muara Enim Sumsel, Senin (28/7).

Bila tidak rampung dalam sebulan, pemerintah akan mengupayakan cara lain agar proses

pembangunan PLTU Banko Tengah yang masuk program 10.000 MW tahap kedua itu tetap bisa berjalan.

Nilai investasi PLTU Banko Tengah ditaksir sekitar US\$ 3,70 miliar. Proyek itu dibangun konsorsium PT BA, PT PLN, PT Truba Alam Manunggal Engineering, dan China Huadian Corp. China Huadian adalah investor terbesar dalam konsorsium itu.

Direktur Utama PT BA Sukrisno, mengaku siap menjalankan perintah Wapres. "Satu bulan cukup. Kami optimistis bisa melakukan itu dalam satu bulan," terang dia.

Meski begitu, dia pun siap bernegosiasi dengan PLN namun harganya tidak setinggi di Jawa. (mam/c122)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 200

13 Asosiasi Tolak Kenaikan Tarif Listrik

Oleh **Damiana N Simanjuntak**

JAKARTA – Sebanyak 13 asosiasi industri menolak rencana kenaikan tarif listrik untuk industri. Alasannya, mereka sedang memacu kapasitas produksi guna memenuhi permintaan menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. "Seluruh industri sedang menggenjot kapasitas produksi naik 20% agar memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Jangan sampai upaya itu dihambat kenaikan tarif listrik," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani usai rapat dengan 13 asosiasi di Jakarta, Selasa (29/7).

Dihubungi secara terpisah Rabu (30/7), penolakan kenaikan tarif listrik juga diungkapkan Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmino) Ambar Tjahyono, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy, Ketua Bidang Regulasi Asosiasi Teh Siap Minum Indonesia (Atsmindo) Riyanto, dan Wakil Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johnny Darmawan.

Menurut Franky, kenaikan tarif listrik akan meningkatkan harga jual, sedangkan daya beli masyarakat masih rendah. "Omzet penjualan bisa turun," ucap dia.

Kini, ke-13 asosiasi itu mengumpulkan data kebutuhan listrik masing-masing sektor. Data itu dapat digunakan untuk mensimulasikan ketahanan industri terhadap kenaikan listrik dan dampaknya.

Ambar Tjahyono meminta PT PLN untuk menunda rencana kenaikan tarif listrik. Selain itu, PLN harus memperbaiki kondisi manajemen internal dan meningkatkan kualitas layanan. "Selama ini, PLN dalam pelayanannya selalu bersikap arogan," kata dia.

Dia juga menyoroti pelaksanaan SKB lima menteri tentang pengalihan hari kerja yang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab, SE Menakertrans tidak menetapkan bahwa Sabtu-Minggu bukan hari lembur.

Atsmindo menolak rencana kenaikan tarif listrik karena SKB lima menteri baru mau diimplementasikan. "SKB itu sudah menimbulkan biaya bagi industri," tandas Riyanto.

Ernovian G Ismi menambahkan, rencana PT PLN menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi sektor industri tidak memiliki konsep matang.

"Kami meminta ada audit transparan di PLN, seperti apa keadaan internal manajemen PLN," ujar dia.

Audit transparan juga harus dilakukan terhadap Pertamina sebagai pemasok batubara kepada PLN dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pembuat kebijakan. "Departemen ESDM harus segera berbenah terkait tidak adanya arah kebijakan energi nasional," kata Ernovian

Dia mengingatkan, pasar masih belum bisa diprediksi akibat fluktuasi kenaikan harga minyak dan resesi ekonomi global. Dari sekitar 18,5% ongkos rata-rata energi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), sekitar 70% di antaranya merupakan kontribusi pemakaian listrik, sedangkan sisanya batubara dan gas. "Untuk sektor garmen, biaya listrik hampir 100% dari keseluruhan ongkos energi," jelas Ernovian.

Kenaikan TDL untuk industri dipastikan membuat harga mobil kembali naik. Sepanjang tahun ini harga mobil telah naik dua kali dengan besaran masing-masing 3-5%. "Kalau dibilang akan naik, ya pasti harga akan naik lagi," ujar Johnny Darmawan.

Menurut dia, saat ini produsen mobil mendapat tekanan dari lonjakan harga bahan baku seperti baja, aluminium dan plastik. "Produsen akan semakin berat jika tarif listrik dinaikkan," jelas Johnny.

Ia menuturkan, biaya listrik berkontribusi besar terhadap ongkos produksi di pabrik. Contohnya, kata dia, untuk menghidupkan robot perakitan dan pengelasan. Namun, Johnny tidak dapat menyebut berapa persentasenya.

Ia khawatir jika harga mobil dinaikkan konsumen akan menunda pembelian mobil. Sejauh ini, kata dia, melambungnya pasar mobil sebesar 48% sampai Juni 2008 mencapai 290 ribu unit dipicu aksi borong mobil oleh konsumen.

Tahun ini pasar mobil domestik diprediksi naik 20% menjadi 520 ribu unit dibanding tahun lalu sebesar 434.449 unit.

Sebelumnya, Menperin Fahmi Idris menuturkan, industri menjadi pelanggan terbesar PLN sekitar 38% atau sama dengan total pelanggan rumah tangga. Sedangkan bisnis di luar industri (termasuk kantor dan mal) hanya 20% dari struktur pelanggan PLN. "Revenue PLN per tahun sekitar 80-85% dari sektor industri," ucapnya. (coy/dry)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2008

BANGUN PLTU DI SUMSEL

Darma Henwa Investasi US\$ 1,8 Miliar

Oleh **Happy Amanda**
dan **Heriyono**

JAKARTA – PT Darma Henwa Tbk melalui anak usahanya, PT Darma Henwa Power (DHP), berniat membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Darma Henwa Power akan menginvestasikan minimal US\$ 1,8 miliar (Rp 16,6 triliun) dengan kapasitas 2 x 600 megawatt (MW).

PLTU tersebut merupakan bagian dari proyek pem-

bangkit swasta (*independent power producer/IPP*). DHP telah memasukkan proposal pembangunan proyek kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, proposal itu baru sebatas hasil studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Proposal lengkap masih dalam tahap pembahasan internal. "Kami berharap, proposal awal segera disetujui oleh PLN," kata Presiden Direktur DHP Kaz Tanaka kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (29/7).

Pembangunan PLTU itu membutuhkan waktu 40 bulan. Biaya *engineering, procurement, and construction* (EPC) diperkirakan sekitar US\$ 1 juta per 1 MW. "Rencananya, listrik dari PLTU akan dimasukkan kepada sistem Pulau Sumatera dan selanjutnya bakal disalurkan ke Jawa Barat melalui sistem transmisi PLN," ujar Kaz.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar membenarkan rencana pembangunan PLTU oleh DPH. "Kajian menyangkut kapan listrik

DHP dibutuhkan dan aspek komersial lain akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai investasi yang diajukan dalam proposal sebesar US\$ 1,8 miliar," ujar Fahmi.

Dia menjelaskan, bila PLTU mulut tambang yang memanfaatkan batubara di sekitar Muara Enim ini rampung, proyek itu akan memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan di Pulau Sumatera.

Menurut Presiden Direktur Darma Henwa Abdurrahman Kunwibowo, perseoran menyiapkan dana

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

1.000 Industri Siap Alihkan Operasional Hari Kerja

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN mengidentifikasi sedikitnya 1.000 industri dari berbagai sektor siap melaksanakan pengalihan operasional ke hari Sabtu-Minggu sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pengoptimalan Penggunaan Daya Listrik.

Direktur Pembangkit Jawa-Bali PLN Murtaqi Syamsudin mengatakan, saat ini sudah terdata sekitar 6.800 unit industri. "Dari jumlah itu, ada sekitar 2.000 yang diidentifikasi bisa melakukan pengalihan jam kerja, namun baru 1.000 industri yang sudah siap," tuturnya, di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, uji coba pergeseran jam/hari kerja industri ini bisa dilakukan awal Agustus 2008. "Jadi seperti rencana semula, yaitu 31 Juli 2008 sudah jalan, atau paling lambat awal Agustus," ucapnya.

Menurut dia, hingga saat ini PLN terus melakukan sosialisasi ke kalangan industri di berbagai daerah, termasuk ke pemerintah daerah setempat terkait pelaksanaan SKB tersebut. "Pada dasarnya industri memahami kondisi pasokan listrik saat ini sehingga mereka mau menjalankan SKB tersebut," tuturnya.

Pembagian klaster industri (sektor-sektor industri di wilayah tertentu) harus berjalan efektif karena program pengalihan jam kerja membutuhkan kedisiplinan. "Jumlah industri banyak dan tersebar di berbagai daerah. Kalau industri yang berada dalam satu kawasan akan mudah peng-

awasannya. Namun, buat yang tersebar memang lebih sulit," katanya.

Di lain pihak, Pelaksana Tugas (Plt) Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelaksanaan SKB pergeseran jam kerja industri ini akan diundur 2 minggu dari rencana semula, yaitu 31 Juli 2008. "Pak Fahmi (Dirut PLN) bilang perlu waktu untuk sosialisasi kepada industri di daerah dan pemda sekitar 3 minggu dari minggu kemarin. Jadi, akan mundur 2 minggu," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, dari Solo dilaporkan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno mengatakan, pengalihan jam kerja ke hari libur (Sabtu dan Minggu) hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Dalam penerapan SKB 5 Menteri tentang pengalihan waktu kerja itu Mennakertrans telah menerbitkan surat edaran (SE) sebagai petunjuk pelaksana. "Jadi sudah jelas, substansinya antara lain pengalihan hari libur Sabtu dan Minggu hanya dilakukan sekali dalam satu bulan. Sedangkan untuk jam lembur, maka jam kerja maksimal 40 jam dalam satu minggu. Jika lebih dari itu, maka dihitung lembur,"

kata Erman Suparno di sela kunjungan ke Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surakarta, Rabu (30/7).

Sedangkan untuk sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan SKB tersebut, Erman Suparno mengatakan, dalam SE Mennakertrans tidak diatur tentang pemberian sanksi. Tetapi konsekuensi yang harus diterima perusahaan adalah pemadaman listrik yang akan dilakukan oleh PLN pada hari yang seharusnya dilaksanakannya pengalihan waktu kerja tersebut. "Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan, maka sudah jelas konsekuensinya, yakni pemutusan aliran listrik dari PLN," ujar Erman.

Terkait mundurnya penerapan SKB 5 Menteri yang efektif dilaksanakan pada pertengahan Agustus mendatang, menurut dia, semua terkait dengan pertimbangan proses persiapan, sehingga bisa lebih matang. "Kebijakan dalam SKB tersebut berlaku bagi perusahaan yang operasionalnya lima hari kerja. Sedangkan yang enam atau tujuh hari kerja, tidak perlu menerapkan," ujarnya.

Kenaikan Tarif

Sementara itu, wacana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri membuat gerah kalangan pengusaha. Sebanyak 16 asosiasi lintas bidang usaha secara tegas menolak kenaikan TDL.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani mengatakan, lintas asosiasi belum

tahu banyak soal hasil pertemuan antara tim kecil Kadin yang mewakili sektor-sektor industri dengan pihak PLN. Namun, lanjut dia, secara tegas lintas asosiasi menolak kesepakatan kenaikan TDL secara *business to business* (b to b).

Ke-16 lintas asosiasi ini mengaku keberatan terhadap

rencana kenaikan tersebut karena mereka menilai kenaikan TDL sekarang ini tidak tepat bagi dunia usaha. Ke-16 asosiasi itu antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia

(Apikci), Asosiasi Minuman Ringan (Asrim), Forum Komunikasi Pangan Indonesia (FKPI), Asosiasi Teh Kemasan (Atmin-do), Asosiasi Sari Buah, Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakop), Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pengolahan Daging Indo-

nesia (Nampa), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Retail Modern Indonesia (Ap-3mi), Asosiasi Produsen Gula Rafinasi (Agri), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

(Endang Kusumastuti/A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Kantor Pemerintahan Masih Boros Listrik

JAKARTA (Suara Karya): Departemen Keuangan (Depkeu) akan mengevaluasi penghematan anggaran di seluruh kantor pemerintah, khususnya terkait pengeluaran untuk biaya listrik.

"Saya akan bandingkan tagihan dari seluruh kantor pemerintah pada Juni 2008 terhadap Mei 2008. Ini terkait penancangan Presiden tentang penghematan listrik pada Mei 2008 lalu," kata Menteri Keuangan (Menkeu)/Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sudah meminta laporan dari PLN mengenai upaya penghematan itu. Namun hingga saat ini PLN belum juga menyampaikan laporannya. "Saya sudah minta seluruh tagihan listrik di seluruh kantor pemerintah dari PLN. Dan Dirut PLN Pak Fahmi Mochtar waktu itu janji memberikan kepada saya pekan lalu, tapi sampai hari ini belum saya terima," ujar Menkeu.

Menkeu sendiri curiga, penghematan listrik di kantor-kantor pemerintah, termasuk di Depkeu belum sepenuhnya dilaksanakan. "Waktu itu semua kantor pemerintah berjanji akan melakukan penghematan.

Kalau tadi banyak yang kipas-kipas, saya kira itu tanda kerprihatinan karena listrik itu langka dan mahal," ujar Sri Mulyani.

Lamban

Di lain pihak, Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati juga menilai bahwa PT PLN lamban merespons kebutuhan listrik di berbagai daerah. Masalah ini sudah menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. "Saya menganggap bahwa PLN terlalu lamban dalam merespons kebutuhan listrik di daerah-daerah. Ini mungkin termasuk evaluasi yang harus kita lihat, terutama dari sisi pemerintah," kata Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, salah satu contoh sulitnya mendapatkan listrik terjadi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). "Gedung Keuangan Negara di Manado yang seharusnya sudah saya resmikan karena sudah selesai, tapi ternyata listriknya belum masuk. Dan katanya harus menunggu enam sampai sembilan bulan," katanya.

Sri Mulyani sendiri mengaku tidak dapat membayangkan bagaimana sulitnya mendapatkan listrik di daerah-daerah yang lebih kecil dibanding Kota Manado. "Manado itu merupakan ibukota Sulut. Jadi saya tidak bisa bayangkan untuk di kota-kota kecil lainnya," ujarnya.

Untuk itu, Menko Perekonomian meminta seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN untuk bekerja lebih responsif, namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sri Mulyani menyebutkan, proyek PLTU 10.000

MW merupakan proyek yang dijamin oleh pemerintah. Sehingga setiap kali ada penandatanganan untuk pembiayaan proyek itu, selalu disaksikan Menkeu.

"Jaminan penuh itu adalah untuk menjamin supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, kualitas proyeknya dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi teknologi maupun keandalannya," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, ke depan, masih banyak yang diha-

rapkan oleh masyarakat dari PLN. Ini karena setelah membangun pembangkit, masih diperlukan transmisi dan distribusi, sehingga pada akhirnya PLN perlu terus menjaga neracanya agar tetap aman.

(Indra/A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 200



Antara/Dwi Prasetya

MONEY FOR POWER: Finance Minister Sri Mulyani (*second right*) shakes hands with Bank Rakyat Indonesia president director Sofyan Baasyir (*left*) while Bank BNI president director Gatot Murdiantoro Suwondo (*second left*) and state power firm PT-PLN vice president director Rudiantara (*right*) look on at a signing ceremony between local banks and PLN in Jakarta on Tuesday. PLN will build a 10,000-megawatt coal-fired power plant with the banks providing loans of Rp 10 trillion (US\$1.1 billion) toward the \$4.4 billion project.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 200

PLN to secure \$900m loan to fund coal-fired power project

Aditya Suharmoko
The Jakarta Post/Jakarta

After completing formalities this week with four local banks for loans worth US\$1.1 billion, state power utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) announced Tuesday it will soon receive another \$900 million from foreign banks to fund power projects.

PLN vice president Rudiantara said PLN has signed agreements with the foreign banks, as yet not specified. It expected to receive the dollar denominated loans shortly.

To complete construction of 35 coal-fired power plants with a total generating capacity of 10,000 megawatts, PLN needed US\$4.4 billion of dollar loans and Rp 17.5 trillion (\$1.9 billion) in local currency, Rudiantara said.

For the dollar loans, the firm had secured \$1.5 billion, would soon receive another \$900 million and expected to mobilize the remaining \$2 billion from internal funds or

other schemes, possibly including a global dollar bond.

PLN secured loans from China Exim Bank in January, a consortium of local banks in April and the Bank of China in May.

On the rupiah denominated loans, a total of Rp 13 trillion had been secured by PLN which "will look for the remaining Rp 4.5 trillion from local banks," Rudiantara said.

Aside from funds to develop power plants, PLN also needs dollar loans worth \$900 million and local loans of Rp 14 trillion to fund electricity transmission systems.

These funds would come from PLN internal sources and the securities market, Rudiantara said.

On Tuesday, PLN signed memorandum of understanding (MoUs) with four local banks — Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mega and Bank Bukopin — for the construction of 13 of the 35 power plants.

BNI, in cooperation with BRI, channeled a dollar

denominated loan worth Rp 2.74 trillion for the construction of a 315-megawatt plant in Banten.

Bank Mega channeled a rupiah denominated loan worth Rp 4.61 trillion for the development of 10 power plants, while Bukopin channeled Rp 2.65 trillion for two power plants.

Construction of the whole 35 power plant program is planned for completion in 2010.

At loan agreement signing ceremonies with the four banks, Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, said she expected PLN to have a healthy balance sheet and to ensure Indonesia had enough electricity.

"PLN has been too slow (in fulfilling electricity needs) ... I will ensure power needs are met," said Sri, who is also the coordinating minister for the economy.

As a result of inadequate electricity supply, some companies are being forced to shift two work days from weekdays to weekends, once a month, starting in August.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <u>31</u>											
HALAMAN : 1										TAHUN 2008	

■ KREDIT PEMBANGKIT SETRUM

Empat Bank Kucurkan Kredit Setrum Rp 10 T

Kurnia Arofah

JAKARTA. Kredit bank kepada pembangkit listrik semakin deras. PT Bank Mega, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank BNI, dan PT Bank Bukopin telah meneken perjanjian kredit untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Selasa (29/7) lalu. Kredit senilai sekitar Rp 10 triliun itu untuk mendanai pembangunan 13 unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Fasilitas utang tersebut terdiri dari dua jenis. *Pertama*, utang sindikasi BNI dan BRI untuk membeli peralatan pembangkit dengan nilai sebesar US\$ 288,56 juta atau setara Rp 2,74 triliun. *Kedua*, utang bilateral dalam bentuk rupiah murni, masing-

masing diberikan oleh Bank Mega Rp 4,61 triliun, dan Bank Bukopin Rp 2,64 triliun.

Fasilitas kredit sebesar Rp 10 triliun ini merupakan pembiayaan tahap kedua untuk proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 Mega Watt (MW). Pada pembiayaan tahap pertama yang berlangsung pada awal 2008, lima bank lokal telah mengucurkan kredit senilai Rp 5,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bank tak perlu cemas mengucurkan utang dalam jumlah besar untuk proyek pembangkit listrik PLN karena pemerintah telah memberikan jaminan penuh, seandainya PLN mengalami gagal bayar. "Bank pemerintah maupun Bank Mega dan Bukopin bisa tenang karena

ada menteri keuangan di belakang PLN," janji Menteri Sri, Selasa (29/7).

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo mengaku, BNI berniat mengucurkan kredit ini ka-

Bank tak perlu takut karena ada menteri keuangan di belakang PLN.

rena kebutuhan setrum sangat tinggi ketimbang kemampuan PLN. "Prospeknya bagus," kata Gatot Selasa (29/7).

Direktur Utama BRI Sofyan Basir yakin, *term* kredit yang ditetapkan oleh BRI untuk PLN

tidak akan memberatkan pabrik listrik plat merah itu. Alasan Sofyan, jangka waktu pelunasan kredit hingga 10 tahun dan bank memberikan jeda waktu kepada PLN untuk tidak membayar cicilan selama tiga tahun.

Tigabelas pembangkit yang mendapatkan pendanaan ini merupakan PLTU yang termasuk dalam kelompok percepatan pembangunan pembangkit setrum gelombang pertama.

Proyek pembangkit yang kecipratan pinjaman ini termasuk PLTU Labuan, PLTU Indramayu, dan PLTU Rembang. Pembangunan seluruh pembangkit listrik yang masuk dalam tahap pertama ditargetkan bisa selesai pada 2011.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

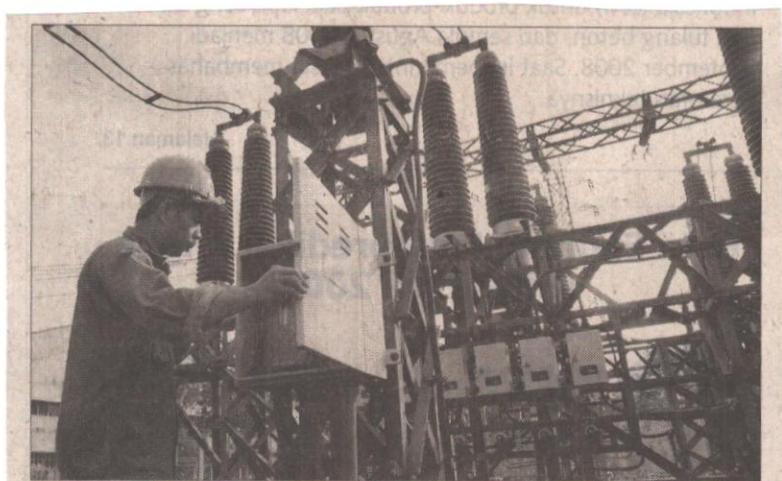
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008



REUTERS/Crack Palinggi

Menteri Keuangan menyesalkan kelambanan PLN.

cb

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

■ EVALUASI PENGHEMATAN LISTRIK

Menkeu Akan Cek Tagihan Listrik Instansi Pemerintah

JAKARTA. Pemerintah tidak main-main dengan kebijakan penghematan listrik. Rencananya, Departemen Keuangan (Depkeu) akan segera mengevaluasi hasil penghematan itu di setiap kantor pemerintah.

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan penghematan listrik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengecek satu persatu tagihan listrik Mei dan Juni 2008

dari seluruh kantor pemerintah.

Menkeu akan membandingkan tagihan listrik dua bulan tersebut. Ini karena, "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan penghematan listrik di kantor pemerintahan itu pada Mei 2008," kata Sri Mulyani, Selasa (29/7) lalu.

Saat ini Depkeu sudah meminta seluruh tagihan listrik kantor-kantor pemerintah dari PLN. "Tapi sampai hari ini reke-

ning tagihan itu belum saya terima," keluh Menkeu.

Sri Mulyani menduga selama ini upaya penghematan listrik di kantor-kantor pemerintah khususnya di lingkungan Depkeu belum terlaksana sepenuhnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi juga menyesalkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang lamban merespon kebutuhan

setrum di berbagai daerah. Dia khawatir respon yang lamban bakal menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. "Ini termasuk evaluasi yang harus saya lihat terutama dari sisi pemerintah," katanya.

Menkeu mengaku mengalami sendiri bagaimana lambannya kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Ia mengungkapkan, bagaimana sulitnya mendapatkan listrik di

Manado, Sulawesi Utara. "Gedung Keuangan Negara di Manado seharusnya sudah saya resmikan, tapi ternyata listriknya belum ada dan harus menunggu enam sampai sembilan bulan," katanya.

Karena itu, Menkeu meminta agar PLN bekerja lebih responsif namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Uji Agung Santosa

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 <u>31</u>		
HALAMAN : 13		TAHUN 2008

■ HARGA LISTRIK PANAS BUMI

Pembangkit Panas Bumi Segera Punya Patokan Harga Baru

JAKARTA. Tidak lama lagi pemerintah bakal memberlakukan patokan harga jual listrik panas bumi. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Ditjen LPE) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal merevisi peraturan yang menjadi patokan harga jual listrik panas bumi.

Kepala Sub Direktorat Harga dan Subsidi Listrik Ditjen LPE Tumpal Gultom mengungkapkan

kan, Ditjen LPE segera mengubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 269-12/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan PT PLN. "Satu atau dua pekan lagi, BPP yang baru sudah akan ada," kata Tumpal, Selasa (29/7).

Janji pemerintah tersebut agaknya menjadi tanggapan atas desakan pengusaha panas bumi, agar pemerintah secepatnya

merevisi patokan harga jual listrik panas bumi. Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Surya Darma bilang, jika revisi tak segera dilakukan, pengembangan industri panas bumi akan tertunda.

Padahal, target pada 2011, Indonesia bisa memperoleh listrik sebesar 2.500 Mega Watt (MW) hingga 3.000 MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Menurut Surya, Peraturan Men-

teri ESDM yang ada selama ini, tidak mencerminkan harga keekonomian pengembangan panas bumi. Sesuai peraturan itu, pemerintah menetapkan BPP, patokan menghitung formula harga jual listrik panas bumi ke PLN, berdasarkan per subsistem ketenagalistrikan.

Padahal saat bernegosiasi, pengembang listrik panas bumi dan PLN sepakat menggunakan BPP per sistem. Misalnya, harga

dipatok untuk sistem Jawa-Bali, atau sistem Sumatera.

Jika harga berdasarkan subsistem, harga jual listrik panas bumi ke PLN seringkali merugikan pengembang listrik. Ambil contoh, saat ini harga jual di Sumatra Bagian Selatan hanya Rp 480 per KWh. Padahal, harga listrik di sistem Sumatra mencapai Rp 850 per KWh.

Dessy Aritonang

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : F2

TAHUN 20

PLN siap batalkan penerbitan obligasi

Oleh BAMBANG P. JATMIKO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap membatalkan penerbitan obligasi global senilai Rp10 triliun atau setara US\$1,1 miliar, dan menggantinya dengan pinjaman bank, menyusul rencana pemerintah yang menyerahkan setoran jaminan ke perseoran.

Komisaris Utama PLN Alhلال Hamdi mengatakan dana yang diserahkan oleh pemerintah akan dijadikan *cash collateral* (jaminan tunai) untuk

membuka *letter of credit* (L/C) di bank. Melalui cara ini, PLN akan memperoleh pendanaan dari bank.

"Kami telah berbicara dengan Menteri Keuangan mengenai setoran jaminan tersebut, dan selanjutnya tinggal menunggu klarifikasi Bank Indonesia. Jika dirilis, kami bisa membatalkan *global bond* karena bisa mendapat pinjaman dari bank," katanya kepada *Bisnis* pekan ini.

Untuk pendanaan pembangunan pembangkit 10.000 Megawatt (MW), PLN butuh

dana sebesar US\$4,4 miliar, dan Rp17,5 triliun. Dari dana itu, perseroan telah memenuhi kebutuhan dana dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar US\$1,45 miliar, dan Rp13 triliun dalam denominasi rupiah.

Menurut dia, PLN tengah bernegosiasi dengan dua bank asal China untuk membiayai pembangunan empat PLTU, yaitu PLU Pacitan, PLTU Teluk Naga, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Tanjung Awar-Awar. Adapun dua bank itu adalah China Exim Bank dan Bank of China (BoC).

Dalam proyek itu, Bank Ekspor-Import China (China Exim Bank) akan mendanai kebutuhan valas pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 10.000 MW senilai US\$1,23 miliar yang terdiri dari PLTU Pacitan berkapasitas 2x330 MW, PLTU Teluk Naga (2x315 MW), dan PLTU Pelabuhan Ratu (2x315 MW). "Nilai pendanaan mencapai US\$1,9 miliar. Untuk BoC kami masih negosiasi."

Alhلال tidak merinci nilai pinjaman yang tengah dinegosiasi kepada BoC.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T2

TAHUN 200

Hanya 2.000 perusahaan yang siap geser hari kerja

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Pemerintah mencatat dari 6.800 perusahaan skala besar di Indonesia hingga sekarang hanya sekitar 2.000 perusahaan yang telah menyatakan siap melaksanakan ketentuan peraturan bersama lima menteri yang di dalamnya mengatur pergeseran hari kerja industri ke Sabtu dan Minggu.

Direktur Jawa-Bali Madura PT Perusahaan Listrik negara (PLN) Murtaqi Syamsudin menuturkan perseroan telah menginventarisasi sekitar 6.000 perusahaan dari keseluruhan 6.800 perusahaan yang wajib mengalihkan hari kerja.

Dari jumlah tersebut, katanya, sekitar 2.000 perusahaan di antaranya mengaku siap menggeser hari kerja ke Sabtu-Minggu.

"Sekitar 2.000 perusahaan menyatakan siap memindahkan hari kerja ke Sabtu dan Minggu," ujarnya se usai pe-

nandatanganan perjanjian kredit antara PLN dan empat perbankan nasional di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, PLN akan aktif berkoordinasi dengan Pemda untuk menyiapkan pelaksanaan pergeseran hari kerja sebelum Agustus. Masa sosialisasi ini, dilakukan untuk membentuk pemahaman yang sama di kalangan industri terkait krisis listrik.

Dengan adanya persepsi yang sama maka diharapkan PLN tidak perlu menerapkan sanksi ataupun insentif terkait implementasi peraturan kewajiban pergeseran hari kerja.

"Industri sudah menyampaikan bahwa mereka memahami betul persoalannya dan mereka akan mendukung. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan pasokan listrik bersama," tegasnya.

Menteri Keuangan sekaligus Plj. Menko Perekonomian mengatakan sebelum menerap-

kan isi ketentuan peraturan lima menteri, PLN harus terlebih dahulu melakukan pemetaan industri di tiap-tiap daerah.

"Terutama daerah mana atau zona yang membutuhkan *demand management* atau mengalihkan *demand*-nya itu."

Terkait dengan implementasi peraturan bersama tersebut, pemerintah memutuskan untuk menundanya sekitar dua minggu dari jadwal semula yang direncanakan mulai efektif 31 Juli.

Pemunduran itu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada PLN mensosialisasikan kebijakan ini kepada dunia usaha.

Murtaqi Syamsudin menambahkan dalam melakukan sosialisasi, PLN menargetkan program tersebut sudah selesai pada sebelum Agustus.

"Kami targetkan sebelum Agustus semua sudah bisa jalan." (16)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T 10

TAHUN 200

Jumlah jam kerja pekerja tetap

Oleh MARIA Y. BENYAMIN & YENI H. SIMANJUNTAK
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa dan Bali, terkait dengan pengoptimalan beban listrik, dipastikan tidak akan menambah jam kerja resmi pekerja.

Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengeluarkan surat edaran yang menegaskan jam kerja pekerja tetap 40 jam dalam seminggu, sehingga apabila melampaui jumlah itu akan dihitung sebagai lembur.

Surat edaran itu merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang optimalisasi beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri.

Surat edaran tersebut, kata Erman, untuk menjamin agar tidak muncul kesalahpahaman dari berbagai pihak terhadap isi SKB, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antara pengusaha dan buruh.

Oleh karena itu, dia meminta semua

pihak untuk menanggapi SKB itu dengan bijak dan pekerja harus memahami implementasi SKB tidak akan mengganggu hak pekerja.

"Mengenai masalah jam kerja tidak berubah, sehingga hak pekerja tidak dikurangi. Prinsipnya dalam satu minggu terdapat 40 jam kerja, lebih dari 40 jam harus dihitung lembur," lanjutnya.

Namun, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Yanuar Rizky menilai penghitungan lembur akan menimbulkan masalah tersendiri antara pekerja dan pengusaha.

"Bagaimana membedakan pembayaran untuk kerja lembur yang dilakukan di hari biasa dan yang dilakukan pada Sabtu atau Minggu. Penghitungan upah untuk kerja lembur pada hari

biasa dan hari libur itu *kan* berbeda besarnya,” kata Yanuar.

Dia juga memastikan kualitas hidup pekerja akan menurun, kendati jam kerja resmi para pekerja masih tetap 40 jam dalam sepekan.

“Gaji pekerja itu sudah jelas tidak menutupi kebutuhan hidup minimalnya. Sekarang, waktu kerjanya juga berubah. Apakah pada saat si pekerja libur, istri atau anaknya juga libur? Itu jelas menurunkan kualitas hidup,” jelasnya.

Pekerja, menurut Yanuar, juga kesulitan untuk mencari penghasilan tambahan karena pengaturan jam kerja yang berubah.

Standar perusahaan

Menurut Menakertrans, hal-hal teknis lain yang terkait dengan pengalihan jam kerja tersebut dalam di atur dalam standar operasional perusahaan yang disepakati manajemen perusahaan dan serikat pekerjaanya, sesuai dengan per-

janjian kerja bersama (PKB) masing-masing perusahaan.

Djimanto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyebutkan, penentuan waktu lembur akan diatur oleh setiap perusahaan.

“Jadi, kalau lemburnya Sabtu atau Minggu, belum tentu dihitung sebagai lembur hari libur. Kalau hari biasa pada minggu itu dia sudah libur, maka Sabtu atau Minggu pada saat dia bekerja akan diperhitungkan sebagai hari kerja biasa,” jelasnya.

Djimanto menambahkan pihak pengusaha hingga saat ini masih menunggu kepastian waktu pengalihan jam kerja. Kepastian tersebut, menurutnya, harus telah diperoleh pengusaha setidaknya satu hingga dua minggu sebelum waktu yang ditetapkan.

Pengusaha harus memberitahukan pergeseran hari kerja tersebut kepada berbagai pihak terkait seperti pemasok dan pelanggan. (maria.benyamin@bisnis.co.id/yeni.simanjuntak@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 72

TAHUN 2008

13 Asosiasi industri tolak kenaikan tarif listrik

Oleh YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Sebanyak 13 asosiasi industri menolak rencana kenaikan tarif listrik untuk industri, kendati Kadin Indonesia menoleransi kenaikan tarif listrik hingga 50%.

Kenaikan tarif listrik perlu ditunda karena seluruh industri sedang memacu kapasitas produksi guna memenuhi permintaan yang meningkat menjelang hari raya agama, seperti Lebaran dan Natal.

Penegasan itu disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani usai rapat koordinasi 13 asosiasi industri di Departemen Perindustrian, Selasa.

"Saat ini, sebagian besar industri sedang mengoptimalkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan menjelang Lebaran. Jangan kinerja yang sedang membaik ini dihambat kenaikan tarif listrik," papar Franky.

Dengan alasan yang sama, Ketua Umum Gapmmi Thomas Darmawan mengatakan sejumlah perusahaan pengolahan makanan mulai mendongkrak produksi mengingat pertumbuhan penjualan akan terjadi di sisa enam bulan kedua 2008.

Direktur PT Frans Putratex, Chandra V.Fong, mengatakan di pasar domestik, permintaan kain untuk seragam diperkirakan cukup meningkat menjelang perayaan hari besar keagamaan. Karena itu, dia meminta PLN memberikan jaminan daya listrik yang memadai di sektor pengolahan kain.

Untuk itu, lanjut Franky, ke-13 asosiasi industri secara tegas menolak kenaikan tarif listrik. Mereka antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gapmmi, Asosiasi Produsen

Kakao dan Cokelat Indonesia (Apikci), Asosiasi Produsen Sari Buah, Asosiasi Produsen Garam Beryodium, Perkosmi, Nampa, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Asmindo, Forum Komunikasi Pangan Indonesia, dan Asosiasi Teh Minuman dalam Kemasan.

Dia menjelaskan kenaikan tarif listrik lambat laun akan diterapkan PT PLN. Kalau dilihat dari *cash flow* PLN, indikasi kenaikan tarif listrik makin menguat. "Pengusaha memang tidak bisa apa-apa. Tapi perlu sosialisasi terlebih dahulu," tuturnya.

Dongkrak harga

Menurut Franky, kenaikan tarif listrik akan mendongkrak harga jual sehingga berpengaruh terhadap kinerja penjualan, sedangkan daya beli masyarakat masih rendah. "Omzet penjualan bisa turun," katanya.

Saat ini, lanjutnya, ke-13 asosiasi industri itu sedang mengumpulkan data kebutuhan listrik masing-masing sektor. Data tersebut dapat digunakan untuk mensimulasikan ketahanan industri terhadap kenaikan listrik dan dampaknya. "Solusi sementara, batu bara untuk PLN disubsidi," ujarnya.

Di sisi lain, Franky menjelaskan, asosiasi industri meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan Peraturan Bersama lima menteri tentang pengalihan hari kerja.

"Investor asing meminta surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus jelas," tuturnya.

Dia menerangkan, surat edaran Menakertrans masih menyisakan ketidaksinkronan dengan SKB lima menteri tentang kriteria perusahaan manufaktur yang dikecualikan dari pengalihan jam kerja. Selain itu, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut di tingkat daerah (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

Biaya PLTA Karebbe Inco Rp 3,77 Triliun

PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) meningkatkan perkiraan biaya pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Desa Karebbe, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dari 280 juta dollar AS menjadi 410 juta dollar AS atau setara Rp 3,77 triliun. Peningkatan biaya terutama karena meningkatnya harga peralatan, komoditas, dan biaya tenaga kerja proyek. Director Media, Communications, and Licencing Inco, Jannus T Sihaan, Rabu (30/7), mengatakan, Dewan Komisaris Inco menyetujui perubahan perkiraan biaya itu. "Ini salah satu komitmen Inco berinvestasi di Indonesia, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan energi sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah dan PLN," kata Jannus. PLTA Karebbe diperkirakan selesai pada pertengahan 2011 dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik Inco sebesar 90 MW dari 275 MW menjadi 365 MW. (RED)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2008

Listrik dari Malaysia Disetujui

Memenuhi Kebutuhan di Kapuas Hulu dan Sambas

PONTIANAK, KOMPAS — Rencana PT PLN Wilayah Kalimantan Barat membeli daya listrik dari Sarawak Energy Berhad, perusahaan penyedia listrik di Sarawak, Malaysia, disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Daya listrik tersebut untuk melayani kebutuhan listrik di wilayah perbatasan provinsi itu dan Sarawak.

"Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono atas nama Menteri ESDM telah mengeluarkan surat nomor 1979/29/600.3/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang pengembangan wilayah perbatasan di Kalbar. Surat itu berisi persetujuan Menteri ESDM terhadap pembelian listrik dari Malaysia untuk wilayah perbatasan Kalbar," kata General Manager PT PLN Wilayah Kalbar Haryanto WS, Selasa (29/7) di Pontianak.

Persetujuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara PT PLN Wilayah Kalbar dan Sarawak Energy Berhad pada 17 Juli 2008 di Kuching, ibu kota Sarawak. Dalam pertemuan itu disepakati, PLN akan membeli daya listrik sebesar 400 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, serta 200 KVA untuk memenuhi kebutuhan di Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas.

Untuk penyambungan infra-

struktur listrik dari Serawak ke perbatasan yang saat ini tengah dikerjakan, PLN dikenai kewajiban untuk membayar biaya penyambungan (*connection charge*) di Badau sebesar 544.900 ringgit (sekitar Rp 1,5 miliar) dan di Aruk-Sajingan sebesar 270.400 ringgit (sekitar Rp 743 juta).

Untuk pemakaian daya listrik, PLN diwajibkan membayar dengan harga komersial Rp 930 untuk setiap kWh. Pada 2009 nanti, listrik asal Malaysia itu diharapkan sudah dapat dinikmati warga.

Agar jaringan listrik di perbatasan Kalbar tersambung dengan Sarawak, PLN diperkirakan membutuhkan investasi Rp 700 juta untuk membangun infrastruktur di Badau. Selain itu, PLN diperkirakan membutuhkan Rp 900 juta untuk membangun infrastruktur di Aruk-Sajingan.

Selama ini, kebutuhan listrik di Badau disuplai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Badau

dengan daya 300 KW. Adapun kebutuhan listrik di Aruk-Sajingan disuplai PLTD Sajingan dengan daya 150 KW.

PLN baru bisa melayani 600 pelanggan di Badau dan 200 pelanggan di Aruk-Sajingan. Itu pun listrik hanya bisa menyala 12 jam dalam sehari. Di Badau masih ada 300 keluarga dan di Aruk-Sajingan terdapat sekitar 100 keluarga yang menunggu pelayanan listrik PLN.

Haryanto mengatakan, pembelian listrik dari Malaysia itu disebabkan adanya kebutuhan listrik di daerah perbatasan yang semakin meningkat, sementara kemampuan PLN untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Persoalan itu kian rumit karena masih ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu yang cukup membebani PLN.

"Dengan harga beli solar untuk PLN Rp 11.600 per liter, biaya BBM yang harus dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik berkisar Rp 4.000 per kWh," kata Haryanto. Ia menambahkan, biaya produksi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga jual listrik PLN ke masyarakat sekitar Rp 500 per kWh.

Menguntungkan

Pembelian listrik itu, menurut

Poin Kerja Sama Pembelian Listrik PT PLN Wilayah Kalbar

1 PLN akan membeli daya listrik sebesar 400 KVA untuk wilayah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, serta 200 KVA untuk wilayah Aruk-Sajingan, Kabupaten Sambas.

2 PLN menanggung biaya penyambungan (*connection charge*) 544.900 ringgit (sekitar Rp 1,5 miliar) di Badau dan 270.400 ringgit (sekitar Rp 743 juta) di Aruk-Sajingan.

3 PLN membeli listrik dengan harga komersial Rp 930 per kWh.

4 PLN membangun infrastruktur jaringan listrik hingga di perbatasan di perkiraan investasi yang dibutuhkan Rp 700 juta di Badau dan Rp 900 juta di Aruk-Sajingan.



Haryanto, cukup menguntungkan karena dapat mengurangi kerugian yang selama ini dialami PLN Kalbar. Sebagai gambaran, PLN Kalbar pada tahun 2007 merugi Rp 1,5 triliun, sedangkan pada semester satu tahun 2008

kerugian PLN sudah mencapai Rp 1,3 triliun.

Haryanto menambahkan, dua mesin PLTD di kedua wilayah itu tetap disiagakan untuk mengantisipasi jika listrik dari Malaysia padam. (WHY)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara (kanan), Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo (kedua dari kiri), dan Dirut BRI Sofyan Basyir se usai menandatangani kerja sama pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik, Selasa (29/7) di Jakarta. PLN menerima kredit jangka panjang senilai Rp 10 triliun dari empat bank lokal untuk pembangunan pembangkit listrik.



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 19

TAHUN 2008

Tanpa Perbaikan Internal, Kenaikan TDL Sia-sia

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan tarif dasar listrik atau TDL, tanpa diimbangi perbaikan internal kinerja PT PLN, tidak akan menyelesaikan masalah kelistrikan. Para pengusaha meyakini, rencana PLN menaikkan TDL untuk industri dan dunia usaha, jika dilaksanakan, akan berimbas pada harga jual produk.

Saat ini, kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani, Rabu (30/7) di Jakarta, persentase dampak kenaikan TDL masih dihitung secara cermat.

Kenaikan TDL dipastikan akan menambah berat beban pengusaha. Direktur PT Frans Putratex Chandra V Fong menegaskan, kenaikan harga minyak di pasar dunia membuat bahan baku tekstil melonjak. Jika kini TDL juga naik, biaya produksi akan semakin besar.

Chandra menuturkan, saat terjadi pemadaman listrik selama 3-4 hari dalam seminggu, kerugian industri tekstil sangat signifikan. Hal itu sudah disampaikan ke PT PLN, tetapi tidak ada kompensasi yang diberikan PLN kepada industri. "Tahun lalu, kami ingin menambah 10 persen dari kapasitas terpasang 30 juta meter per tahun untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor, tetapi setelah lihat kondisi pasokan energi mahal kayak begini, terpaksa menunda dulu," papar Chandra.

Melihat situasi yang dihadapi industri, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo memahami apabila beberapa asosiasi menolak rencana kenaikan TDL.

Sedari awal, lanjut Bambang, Kadin sudah mengingatkan, skenario, kenaikan tarif listrik yang diusulkan PLN untuk industri dan bisnis berskala besar yang mencapai Rp 1.300 per kwh sangat memberatkan dunia usaha.

Kadin meminta PLN menghitung kembali biaya produksi listrik yang sangat tinggi, hingga Rp 1.300 pe kwh. Padahal, di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam tidak sampai 1 sen dollar AS.

Tanpa kenaikan TDL, lanjut Bambang, tagihan listrik tiap bulan berdasarkan laporan asosiasi sudah meningkat 10-30 persen.

Kadin menilai kenaikan TDL—tanpa memperbaiki kinerja dan manajemen PLN—tidak akan memecahkan masalah.

Oleh karena itu, Bambang mengharapkan PLN segera melakukan perbaikan internal dengan memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, yang selama ini dimasukkan sebagai biaya produksi. "Ini penting, agar buruknya tata kelola manajemen yang menimbulkan ketidakefisienan tidak dibebankan ke pundak pengusaha," tuturnya.

Bambang mengharapkan pembahasan mengenai TDL melibatkan pemerintah dan DPR karena persoalan ini memiliki dampak sangat luas bagi perekonomian nasional. Selain itu, harus dipertimbangkan struktur industri yang beragam.

"Jangan asal pukul rata. Tidak adil mengorbankan mereka hanya karena ingin PLN tidak merugi karena kesalahan mereka sendiri," kata Bambang menegaskan. (OSA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 27

TAHUN 2008

KEPULAUAN SERIBU

70 Persen Genset Tua, Kabel PLN Putus

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 70 persen mesin genset listrik di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, sudah tua dengan kinerja terus menurun. Sedangkan pasokan listrik PLN melalui kabel bawah laut masih terputus. Hal itu menjadi problem utama terhambatnya pertumbuhan wilayah kepulauan tersebut.

Bupati Kepulauan Seribu Abdul Rachman Andit dan Kepala Suku Dinas Pertambangan Agus Saryanto mengungkap hal itu secara terpisah, Rabu (30/7).

"Minimnya pasokan daya listrik menghambat pertumbuhan wilayah karena listrik merupakan

infrastruktur dasar yang amat dibutuhkan masyarakat," kata Bupati.

Padahal, kata Bupati, banyak sektor kehidupan yang seharusnya tumbuh jika listrik tersedia cukup. Namun di sektor ekonomi, dengan lebih dari 80 persen warganya nelayan, usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan tidak tumbuh akibat minim listrik. Pelajaran komputer di sekolah pun kini tidak bisa dilaksanakan.

Belum terlayani

Layanan administrasi di pulau umumnya masih manual sehingga menghambat kinerja. Banyak

pengelola *cottage* dan vila yang mengajukan penambahan daya listrik belum terlayani. Pengelola industri pariwisata tidak bisa melayani pengunjung dengan maksimal. Misalnya, cukup sulit melayani jika tamu meminta minuman dingin.

Kepulauan Seribu dengan 106 pulau itu hanya ada 11 pulau permukiman yang dihuni sekitar 20.565 orang. Warganya sudah mulai diterangi listrik dari mesin genset pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sejak tahun 1980-an. Kini genset yang semuanya dikelola pemerintah daerah itu ada 44 buah. (CAL)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>		
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN (JUL) AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31)			
HALAMAN : 19			TAHUN 2008

Pengalihan Waktu Kerja Mulai Jalan

PLN Masih Butuh Dana Rp 38,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun pemerintah memberikan tenggang waktu dua pekan, PT Perusahaan Listrik Negara akan menerapkan pengalihan waktu kerja untuk industri yang sudah siap per tanggal 31 Juli ini. PLN memperkirakan terdapat 1.500 industri di Pulau Jawa yang siap untuk mengalihkan waktu kerjanya.

"Karena pendekatannya mengacu pada kesepakatan bisnis dengan industri, (pengalihan) bisa diterapkan kalau industrinya siap," kata Direktur PT PLN untuk Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin, Rabu (30/7) di Jakarta.

Jumlah industri di Jawa yang menjadi pelanggan PLN mencapai jumlah 6.856. Setelah diinventarisasi, hanya 3.052 industri yang memenuhi kriteria dalam surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang pengalihan waktu kerja. "Yang sudah siap beralih sekitar 1.500 industri, kami sudah membuat klusternya," ujar Murtaqi.

Sebelumnya, Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menunda pelaksanaan SKB pengalihan itu sampai pertengahan Agustus. Pemerintah ingin PLN menyosialisasikan rencana pengalihan secara menyeluruh. Selain pengalihan waktu kerja industri, pemerintah juga akan mengeluarkan SKB penghematan listrik bagi pelanggan bisnis. SKB itu rencananya dikeluarkan pertengahan Agustus.

Dengan jumlah industri yang lebih sedikit dari perkiraan, jumlah daya yang bisa dihemat juga jauh di bawah target 600 megawatt (MW). Murtaqi mengatakan, penghematan yang bisa diperoleh dari pengalihan waktu kerja industri per kluster hanya sekitar 150-180 MW per hari.

Berhemat

Untuk memenuhi target pengurangan beban sebesar 600 MW, PLN akan meminta partisipasi pelanggan bisnis yang mencakup mal, perhotelan, dan gedung perkantoran. "Untuk industri, polanya beda. Bukan penggeseran, tetapi mengurangi pemakaian waktu beban puncak. Dari konsumen ini PLN menargetkan bisa ada penghematan 200 MW," tutur Murtaqi.

Adapun sisanya, 200 MW, diharapkan didapat dengan memperluas imbauan hemat listrik kepada konsumen rumah tangga.

SKB penghematan ditargetkan hanya akan berlaku setahun, yaitu hingga tahun 2009; sampai selesainya beberapa pembangkit listrik tenaga uap yang termasuk

dalam program percepatan pembangkit 10.000 MW.

Sementara itu, untuk menyelesaikan proyek percepatan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, PLN masih membutuhkan dana sekitar Rp 38,5 triliun. Perseroan berencana mencari sebagian dananya dari penerbitan obligasi internasional.

Hal tersebut dijelaskan Wakil Direktur PT PLN Rudiantara, Selasa lalu. Rudiantara mengemukakan, penerbitan obligasi internasional terutama diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana valas sebesar 2 miliar dollar AS untuk pembangunan pembangkit-pembangkit di Jawa.

Ia mengatakan, penerbitan *global bond* akan dilakukan sebelum akhir tahun. "Lebih dari setengah kebutuhan valas yang 2 miliar dollar AS ini akan dicari dari pasar. PLN akan tetap hati-hati dan melihat situasi pasar untuk menentukan waktu yang pas."

Selain melalui penerbitan surat berharga, pendanaan proyek itu berasal dari anggaran perusahaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pinjaman dari perbankan, baik dalam maupun luar negeri.

Percepatan pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara tahap I mencakup pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di luar Jawa dengan total daya 8.700 MW. Kebutuhan dana untuk keperluan proyek itu mencapai Rp 72 triliun. (DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
--	--

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 MIGAS UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 6 TAHUN 2008

BIAYA PROYEK KAREBBE MEMBENGKAK

INCO Revisi Capex US\$410 Juta

Jakarta - PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) mengubah perkiraan biaya modal (*capital expenditure*) sebesar US\$410 juta untuk fasilitas pembangkit listrik Karebbe (Proyek Karebbe) di Sungai Larona. Perkiraan modal yang lebih tinggi disebabkan oleh meningkatnya harga peralatan, komoditas dan pekerja proyek. Kendati demikian, ekonomi proyek tetap kuat di saat biaya energi di level tinggi.

■ Sandy Romualdus - NERACA

Proyek Karebbe pertama kali diumumkan pada bulan Oktober 2004 sebagai bagian dari program permodalan perseroan untuk meningkatkan produksi tahunan INCO menjadi sebesar 90,718 metrik ton nikel dalam matte atau sebesar 25% diatas kapasitas rancang saat ini.

Namun konstruksi Proyek Karebbe dihentikan untuk sementara waktu pada bulan Januari 2006 namun dimulai kembali pada tanggal 1 Oktober 2007 setelah dikeluarkan ijin kehutanan pada akhir Agustus 2007.

Perkiraan biaya modal awal saat itu sebesar US\$275 juta hingga US\$280 juta yang ditentukan sebelum penghentian sementara konstruksi dan termasuk sekitar US\$100 juta untuk proyek optimisasi perseroan dalam meningkatkan produksi.

Menurut Claudio Bastos, Senior Vice President and Chief Financial Officer, revisi *capex* tersebut mencatat harga yang lebih tinggi, dan mencerminkan penilaian biaya yang lebih baik karena pekerjaan yang signifikan dalam bidang pengadaan, rekayasa dan konstruksi proyek yang telah selesai.

"Saat ini kami mengantisipasi Proyek Karebbe akan dapat beroperasi pada paruh pertama 2011," katanya dalam siaran pers yang diterima *Neraca* di Jakarta, Selasa (30/7).

Ia menambahkan, proyek Karebbe diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembangkit listrik INCO sebesar 90 megawat menjadi 365 megawat dari 275 megawat.

"Proyek ini secara signifikan akan mengurangi biaya tunai produksi nikel dalam matte dengan menurunkan ketergantungan pada pembangkit tenaga uap yang mahal yang telah digunakan selama siklus harga metal tinggi saat ini untuk meningkatkan produksi nikel," tukas Caludio.

Lebih lanjut, katanya, proyek Karebbe akan mengurangi resiko pasokan energi dalam tahun-tahun dengan tingkat curah hujan yang rendah.

Sementara itu, mengingat pembangkit listrik adalah sumber energi yang dapat diperbaharui, INCO mengharapkan Proyek Karebbe memberikan dampak yang baik bagi perubahan iklim dan akan menghapuskan beberapa ratusan ribu metrik ton emisi gas rumah kaca per tahun bila dibandingkan dengan pembangkit tenaga uap yang konvensional.

Untuk diketahui, dalam triwulan pertama 2008, INCO mencatat laba bersih sebesar US\$139,6 juta (*unaudit*) atau US\$0,014 per saham. Jumlah itu memang turun dibandingkan laba bersih periode sama tahun lalu yang mencapai US\$227,8 atau US\$0,023 per saham.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, penjualan Inco mencapai 380 juta dolar AS, menyusut dibandingkan dengan 446,7 juta dolar AS pada triwulan yang sama 2007.

Menurut Presiden Direktur INCO, Arif Siregar, penurunan penjualan terutama karena turunnya harga realisasi rata-rata nikel dalam matte. Produksi nikel dalam matte pada triwulan pertama 2008 sebesar 20.136 metrik ton, dibandingkan dengan 17.980 metrik ton pada periode yang sama 2007.

"Kami mencapai hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dimana kenaikan kurang lebih 1.200 metrik ton, di antaranya disebabkan oleh penundaan rencana penghentian pemeliharaan tanur listrik menjadi di bulan April 2008 dan selebihnya karena operasi yang lebih baik," jelasnya bebrapa waktu lalu.

Angka produksi mencerminkan sedikit lebih dari 25 persen target optimis produksi 2008 sebesar 78.000-hing-

ga-79.000 metrik ton.

"Perseroan mencapai hasil ini karena kenaikan kadar nikel, tersedianya energi untuk tanur listrik dan peningkatan efisiensi produksi, meskipun kenyataannya kami mengalami tingkat curah hujan yang lebih rendah dalam wilayah utama kami dibandingkan dengan periode yang sama 2007," ungkapnya.

Harga realisasi rata-rata nikel dalam matte PT Inco adalah 21.187 dolar AS per metrik ton pada triwulan pertama 2008, dibandingkan 29.149 dolar AS per metrik ton pada periode sama 2007 dan 23.816 dolar AS per metrik ton pada triwulan keempat 2007.

Biaya produksi tunai per unit pada triwulan pertama 2008 naik 20 persen menjadi 8.857 dolar AS per metrik ton dari 7.386 dolar AS per metrik ton pada triwulan sama 2007. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN (JUL) AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31)

HALAMAN: 15

TAHUN 2008

13 Sektor Tolak TDL Naik

JAKARTA (SINDO) – Sedikitnya 13 sektor industri manufaktur menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi) Franky Sibarani mengatakan, saat ini ke-13 sektor industri tersebut sedang menggenjot kapasitas produksi hingga 20% untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

"Jangan sampai upaya itu dihambat kenaikan tarif listrik," katanya se usai rapat koordinasi 13 asosiasi di Jakarta, Selasa (29/7).

Adapun ke-13 asosiasi industri yang menolak kenaikan tarif antara lain Asosiasi Per tekstilan Indonesia (API), Gapmmi, Asosiasi Produsen

Kakao dan Cokelat Indonesia (Apikci), Asosiasi Produsen Sari Buah, Asosiasi Produsen Garam Beryodium, Perkosmi, Nampa, AEKI, Asmindo, Forum Komunikasi Pangan Indonesia, Asosiasi Teh Minuman dalam Kemasan, dan APPSI.

Menurut Franky, kenaikan tarif listrik akan meningkatkan harga jual sehingga berpengaruh terhadap kinerja penjualan. Sementara daya beli masyarakat masih rendah. "Omzet penjualan bisa turun," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jawa, Madura, dan Bali PLN Murtaqi Syamsuddin menga-

takan, hingga kemarin sudah 3052 industri yang telah menyatakan kesiapannya melaksanakan pergeseran waktu kerja. "Sekarang PLN sudah buat kluster-klusternya," kata Murtaqi kepada SINDO.

Isuzu Tunda Investasi

Sementara itu, ketidakpastian pasokan listrik dari PLN membuat PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menunda investasi hingga 2009.

IAMI, yang merupakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) Isuzu, rencananya akan meningkatkan kapasitas produksi kendaraan niaga Elf sebesar 50% menjadi 1.500 unit per bulan dari sebelumnya 1.000 unit.

Direktur IAMI Djony Bunarto Tjondro mengatakan, hingga saat ini pihaknya be-

lum mendapat kepastian memperoleh pasokan tambahan energi listrik. Selain untuk menambah utilitas atau kapasitas terpasang, pasokan listrik baru juga diperlukan untuk mendukung produk kendaraan niaga baru yang akan diusung Isuzu pada 2009 mendatang.

"Salah satu permasalahan yang dihadapi untuk ekspansi ini adalah masalah listrik. Kita juga memerlukan listrik tambahan untuk produk baru kita yang akan segera dirakit di sini (Indonesia)," ujar Djony saat dihubungi SINDO kemarin.

Djony menjelaskan, selain membutuhkan pasokan listrik, IAMI juga perlu mengkaji potensi pasar pada kuartal terakhir 2008 ini.

Direktur Industri, Trans-

portasi, dan Kedirgantaraan Departemen Perindustrian (Depperin) Syarif Hidayat mengakui, Isuzu memang berniat menambah kapasitas produksinya dari 1.000 unit per bulan menjadi 1.500 unit per bulan. Namun, Syarif menyayangkan jika terjadi penundaan investasi baru akibat tersendatnya pasokan energi listrik.

"Serba susah memang, PLN dalam kondisi serbahebat. Kalau diminta pasokan baru sudah tentu akan tertunda investasinya," kata dia.

Syarif mengharapkan dengan rampungnya program pengadaan pembangkit tenaga listrik 10.000 Megawatt (MW) pada 2009, sejumlah investasi baru di sektor otomotif bisa terlaksana.

(agung kurniawan/
ferial thalib)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

PLN Finalisasi Pinjaman USD1,95 M

JAKARTA (SINDO)—PTPerusahaan Listrik Negara (PLN persero) sedang memfinalisasi pinjaman dari perbankan China senilai USD1,95 miliar untuk tambahan pendanaan percepatan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 megawatt (MW). Total kebutuhan dana untuk program nasional itu mencapai USD4,4 miliar dan Rp17,5 triliun, atau total sekitar Rp57,98 triliun.

"Untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam bentuk dolar, Agustus ini kita akan menandatangani pinjaman tersebut," ujar Komisaris Utama PLN Al Hilal Hamdi ketika dihubungi SINDO kemarin.

Pinjaman tersebut akan diperoleh dari China Exim Bank dan Bank of China. Al Hilal menambahkan, penandatanganan pinjaman tersebut rencananya dilaksanakan setelah Olimpiade Beijing.

Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengatakan bahwa penajakan untuk pinjaman tersebut saat ini sudah dalam tahap finalisasi. Menurut dia, untuk pendanaan dalam bentuk dolar, perseroan masih mengalami kekurangan sebesar USD2,9 miliar dari USD4,4 miliar yang dibutuhkan. Sebagian kecil dari kekurangan itu akan dibiayai dari anggaran internal PLN dan sisanya akan dicari dari perbankan nasional maupun luar negeri. "Sekarang ini perbankan nasional mulai tertarik memberi pinjaman dalam bentuk dolar," ujarnya.

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan bahwa PLN juga masih mencari pendanaan untuk pembangunan jaringan transmisi dan biaya operasional setelah PLTU dibangun.

(ferial thalib)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

PERINDUSTRIAN

Sudah 2.300 Industri Siap Geser Waktu Kerja

JAKARTA (MI): PT PLN (persero) menyatakan saat ini, dari 6.800 perusahaan di Indonesia yang terkena kewajiban SKB Lima Menteri tentang Pengalihan Jam Kerja Industri, sebanyak 2.300 perusahaan telah siap menggeser waktu produksi. Karena itu, perpanjangan waktu pelaksanaan pengalihan jam kerja hanya berlaku bagi industri yang memang belum siap.

"Bagi industri yang sudah siap, pengalihan jam kerja tetap mulai dilaksanakan per 31 Juli 2008," ujar Direktur PLN Jawa Madura Bali (Jamali) Murtaqi Syamsuddin, di Jakarta, Selasa (29/7).

Dia mengatakan, dari 2.300 industri yang bisa dialihkan jam kerjanya, baru 50% atau 1.150 industri yang sudah menandatangani berita acara dan siap untuk mengalihkan jam kerjanya. Sementara sisanya, hingga kini belum menandatangani berita acara.

Bagi industri yang belum siap, lanjut dia, PLN masih memberikan tenggat waktu hingga Agustus 2008. "Saya tidak mengatakan mundur karena setiap industri kan beda kesiapannya."

Ia menuturkan, dari setiap gugusan industri, PLN menargetkan beban yang dapat dikurangi sekitar 180 megawatt (Mw) per hari. Padahal, pengurangan beban listrik mestinya 600 Mw.

Tolak TDL Naik

Sementara itu, 13 asosiasi industri di sektor manufaktur menolak rencana kenaikan tarif listrik untuk industri di tengah membengkaknya biaya produksi akibat bahan baku dan energi. Sebab, hal itu bisa mengganggu upaya peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan menjelang perayaan hari besar keagamaan.

"Penaikan tarif listrik untuk tahun ini jelas kami tolak. Sebab, seluruh industri sedang memacu kapasitas produksi hingga 20% dan itu bisa mengganggu ketersediaan barang di masyarakat," kata Sekjen Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman Franky Sibarani.

Menurut Franky, indikasi kenaikan tarif listrik terlihat makin menguat tatkala melihat kesulitan keuangan yang tengah dihadapi PT PLN saat ini.

(Ray/Pia/Zhi/E-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 28

TAHUN 200

Rumah Bantuan belum Berlistrik

SEBANYAK 80 ribu rumah bantuan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi



■ MI/AMIRA

Aceh-Nias dan LSM asing tidak dilengkapi fasilitas sambungan listrik. Akibatnya, sebagian warga membiarkan bantuan itu terbengkalai. "Rumah yang belum dilengkapi sambungan listrik berada di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan

Simeulue," ungkap General Manager PLN wilayah Aceh Wahyu Sulaeman. BRR sendiri tidak memiliki data persis jumlah rumah yang tidak dialiri listrik. Mereka baru menerima 16 ribu laporan permohonan dari masyarakat.

Saat ini, banyak korban tsunami terpaksa menempati rumah gelap karena tidak mampu memasang listrik. Sebagian warga lainnya membiarkan bantuan itu terbengkalai dan tidak didiami.

Ketua Komisi D DPRD Aceh Sulaiman Abda mengatakan pihaknya meminta BRR lebih serius dalam persoalan penyediaan rumah bantuan. **(MR/N-4)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 200

Panas bumi akan dapat insentif

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah menjanjikan perubahan pola penetapan biaya pokok produksi tenaga listrik menjadi lebih menguntungkan industri panas bumi sekaligus memastikan kelangsungan program 10.000 MW kedua yang 70% di antaranya berbasis panas bumi.

Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Tumpal Gultom mengatakan sebenarnya BPP tenaga listrik yang menjadi basis penentuan harga beli listrik panas bumi oleh PLN, sebagaimana ditetapkan dalam Permen ESDM No.269-12/26/600.3/ 2008, sudah relatif diterima oleh industri.

Namun, dia mengakui ada satu ganjalan, yaitu mengenai BPP pada sistem Sumatra Bagian Selatan-Sumbar-Riau yang dinilai sangat rendah, yakni Rp565 per kWh. Dalam suratnya, tuturnya, API menginginkan agar BPP wilayah itu disatukan dengan BPP sistem Sumatra Bagian Utara atau penyatuan harga beli untuk wilayah Sumatra sekaligus.

"Jadi dalam konteks pembelian tenaga listrik PLTP seajutinya sudah cukup ideal. Hanya ada satu saja yang menjadi masalah dan kami memang akan melakukan evaluasi bersama supaya semuanya jelas," papar Tumpal, Selasa.

Terkait dengan keseriusan untuk revisi permen tersebut, tuturnya, pihaknya sudah mengantongi disposisi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan surat dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Ener-

gi. "Semua surat sudah masuk. Tinggal pembahasannya dan karena BPP tidak 100% dalam kendali Ditjen LPE. Oleh karena itu, revisi tidak bisa terburu-buru."

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro membenarkan soal rencana itu. "Saya sudah meminta Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi segera merevisi [Permen tentang BPP tenaga listrik]."

Tidak masuk akal

Ketua Umum API Surya Darma mengatakan BPP untuk Sumbagsel yang hanya US\$0,05 sen tidak masuk akal karena dibandingkan dengan harga produksi listrik berbasis batu bara, saat ini sudah mencapai US\$0,078 sen per kWh. BPP, katanya, tidak boleh menggunakan basis nilai investasi pada masa lalu, karena panas bumi dibangun berbasis nilai investasi sekarang dan masa depan.

"Jadi kami minta BPP itu direvisi, bahkan direvisi secara keseluruhan terkait dengan sistem pencarian angkanya. Kalau bisa dibuat sistem nasional dengan kisaran harga US\$0,07--US\$0,08 sen per kWh," jelas Surya Dharma. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

1.150 Industri Siap Alihkan Jam Kerja

Yang belum siap sudah harus mengalihkan jam kerja pertengahan Agustus.

JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan pengunduran waktu pelaksanaan pengalihan jam kerja hanya berlaku bagi industri yang memang belum siap. Bagi industri yang sudah siap, pengalihan jam kerja tetap mulai dilaksanakan per 31 Juli 2008.

Direktur PLN Jawa Madura Bali (Jamali) Murtaqi Syamsuddin di Jakarta, Selasa (29/7), mengatakan dari 2.300 industri yang bisa dialihkan jam kerjanya, baru 50 persen atau 1.150 industri yang sudah menandatangani berita acara dan siap untuk mengalihkan jam kerjanya. Sementara sisanya, hingga kini belum menandatangani berita acara.

Bagi industri yang belum siap,

lanjut dia, PLN masih memberikan tenggat waktu hingga pertengahan Agustus 2008. "Saya tidak mengatakan mundur, karena setiap industri kan beda ke siapannya. Mana yang sudah siap langsung jalan akhir Juli ini, karena itu kesepakatan *business to business*," paparnya.

Ia menuturkan, dari pengalihan jam kerja industri ini PLN menargetkan bisa menekan pemakaian listrik sebesar 600 megawatt (MW) per hari. Namun, diakui dia, dari setiap kluster industri, PLN hanya bisa menekan pemakaian listrik sebesar 180 MW per hari.

"Kekurangannya, diharapkan didapat dari mal, gedung perkantoran, hotel, dan pelanggan rumah tangga," ujarnya.

Murtaqi menambahkan, terkait pengalihan jam kerja industri ini, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). "Pengunduran waktu dua minggu ini kita pergunakan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian/ Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mengundur pelaksanaan pengalihan jam kerja industri ke Sabtu-Ahad dari semula mulai 31 Juli 2008 menjadi sekitar dua pekan berikutnya.

Pengunduran pelaksanaan tersebut, menurut Menkeu, akan digunakan PLN untuk melakukan sosialisasi dengan pemda. Selain itu, PLN juga akan melakukan pemetaan terutama daerah-daerah atau zona yang membutuhkan listrik dan daerah-daerah mana yang dapat dialihkan pasokan listriknya.

Sementara itu, rencana PLN menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bersamaan dengan kebijakan pengalihan hari kerja di-kecam kalangan asosiasi pengusaha. Pasalnya, secara bersamaan kalangan industri sedang meningkatkan produksi untuk memenuhi target permintaan yang tinggi jelang Ramadhan, Lebaran, dan Natal.

Penolakan gabungan sebanyak 13 asosiasi itu merupakan

hasil rapat koordinasi industri di Jakarta, Selasa (29/7), setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk jadwal pengalihan hari kerja yang masih harus disesuaikan dengan jadwal pemenuhan target produksi.

Ke-13 asosiasi industri yang menolak kenaikan tarif listrik itu antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gapmmi, Asosiasi Produsen Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI), Asosiasi Produsen Sari Buah, Asosiasi Produsen Garam Ber-yodium, Perkosmi, Nampa, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Pengusaha Meubel Indonesia (Asmindu), Forum Komunikasi Pangan Indonesia, Asosiasi Teh Minuman dalam Kemasan, dan Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI).

"Banyak pesanan yang harus diselesaikan untuk hari Ramadhan, Lebaran, dan Natal. Makanya, kalangan industri sedang menggenjot kapasitas produksi naik 20 persen. Makanya, kami minta jangan sampai upaya itu

dihambat kenaikan tarif listrik," papar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), Franky Sibarani, mewakili 13 asosiasi usai rapat koordinasi ke-13 industri di Jakarta, Selasa (29/7).

Yang dikhawatirkan kalangan asosiasi, katanya, kenaikan tarif listrik akan meningkatkan harga jual sehingga berpengaruh terhadap kinerja penjualan, sedangkan daya beli masyarakat masih rendah. Omzet penjualan bisa turun, dan industri bisa berpotensi merumahkan pekerjanya.

Franky menjelaskan, PT PLN sangat mungkin akan menaikkan tarif listrik, meski saat ini diakui oleh perusahaan tersebut tidak ada kajian kenaikan TDL untuk industri. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari *cash flow* PLN, yang menunjukkan indikasi kenaikan tarif listrik makin menguat. "Kalaupun (tetap) dinaikan, perlu ada sosialisasi dululah, karena memang pengusaha memang tidak bisa apa-apa," tuturnya.

■ dia/zak